

# DISKUSI RUANG KOLABORASI MODUL 3.1

KELOMPOK

**DEWA DIYAH**

**ADE WILDAN NURHAMDIYAH**

101  
fell in love with it.  
village

# ANGGOTA KELOMPOK



ADE



WILDAN



MURHAM

# STUDY KASUS

Pada akhir kegiatan tahun pelajaran, sekolah mengadakan rapat kenaikan kelas yang melibatkan kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan seluruh dewan guru. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas laporan hasil belajar murid selama satu tahun pelajaran dan menentukan kriteria kenaikan kelas bagi setiap siswa.

Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa siswa yang memiliki persentase kehadiran di bawah 95% dan nilai capaian kognitif mereka juga berada di bawah standar yang telah ditetapkan (minimal 4 mata pelajaran di bawah KKM). Namun, kepala sekolah memberikan perintah kepada dewan guru untuk memberikan nilai kepada semua siswa tanpa kecuali, dengan syarat minimal mereka naik kelas. Hal ini menjadi dilema karena jika ada siswa yang tidak naik kelas, mereka dapat merasa malu dan akhirnya mungkin putus sekolah.

# STUDY KASUS

Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwa anak-anak tidak boleh putus sekolah, dan sekolah yang memiliki siswa putus sekolah akan mendapatkan teguran.

Keputusan untuk memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi standar penilaian namun tetap dinaikkan kelas menjadi dilema bagi guru. Mereka merasa bahwa tindakan tersebut dapat merugikan marwah guru dan melanggar prinsip penilaian yang adil. Namun, tekanan dari kepala sekolah dan ketakutan akan teguran pemerintah menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kasus ini.

# PARADIGMA DILEMA ETIKA

**Rasa keadilan melawan rasa kasihan**

**Dalam kasus ini, ada konflik antara "Rasa Keadilan" dan "Rasa Kasihan." Guru-guru ingin memberikan nilai sesuai dengan prestasi siswa, agar adil. Namun, kepala sekolah merasa kasihan dan takut siswa yang tidak naik kelas akan putus sekolah karena aturan pemerintah. Jadi, ada dilema antara berpegang pada keadilan atau menunjukkan kasihan kepada siswa-siswa tersebut**

# PRINSIP DILEMA ETIKA

**Berpikir berbasis rasa peduli**

**Dalam kasus ini, prinsip "Berpikir berbasis rasa peduli" sangat relevan. Kepala sekolah harus mempertimbangkan kepentingan siswa yang mungkin putus sekolah jika tidak naik kelas karena nilai rendah. Rasa peduli terhadap masa depan siswa menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan, meskipun ada konflik dengan prinsip keadilan dalam penilaian.**

# PENGUJIAN

Dalam memastikan apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bukan, serta apakah keputusan yang kami ambil sudah tepat atau belum, perlu dilaksanakan beberapa uji yang terangkum dalam 9 langkah pengujian.

# 1. MENGENALI NILAI-NILAI YANG SALING BERTENTANGAN

Dalam kasus ini, terdapat dua nilai yang saling bertentangan. Pertama, terdapat nilai keadilan yang dipegang oleh guru-guru, yang meyakini bahwa memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi standar penilaian melanggar prinsip keadilan dalam penilaian. Mereka percaya bahwa nilai harus mencerminkan pencapaian siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, terdapat nilai keprihatinan terhadap nasib siswa yang mungkin putus sekolah jika tidak naik kelas, yang dipegang oleh kepala sekolah. Kepala sekolah merasa perlu memberikan mereka kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan meskipun nilai dan kehadiran mereka rendah. Dalam kasus ini, nilai keadilan dalam penilaian bertentangan dengan rasa keprihatinan terhadap siswa yang mungkin putus sekolah.



## 2. MENENTUKAN SIAPA SAJA YANG TERLIBAT

SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

DEWAN GURU

MASYARAKAT

SISWA

WALI SISWA

### 3. KUMPULKAN FAKTA-FAKTA YANG RELEVAN DALAM SITUASI INI

Pada akhir tahun pelajaran, sebuah rapat kenaikan kelas digelar di sekolah, mengikutsertakan kepala sekolah, wali kelas, guru BK, seluruh dewan guru dan seluruh tenaga kependidikan. Dalam laporan hasil belajar siswa, beberapa di antaranya memiliki tingkat kehadiran di bawah 95% dan nilai akademik yang rendah (maksimal 4 mata pelajaran di bawah KKM). Namun, kepala sekolah memberi perintah kepada dewan guru untuk memanipulas kehadiran dan memberikan nilai kepada semua siswa, dengan syarat minimal mereka harus naik kelas. Hal ini menimbulkan dilema etika, karena meskipun melanggar prinsip penilaian yang adil, konsekuensi teguran dari pemerintah dan potensi siswa putus sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

#### 4. PENYUJIAN BENAR/SALAH: A. UJI LEGAL:

Dalam situasi ini, tidak ada pelanggaran hukum yang terlihat, karena keputusan untuk memanipulasi kehadiran dan memberikan nilai kepada semua siswa meskipun mereka tidak memenuhi standar penilaian didasarkan pada arahan dari kepala sekolah dan himbauan dari pemerintah untuk mencegah siswa putus sekolah. Namun, secara etika, tindakan ini dapat menjadi perdebatan apakah melanggar etika pengajaran yang adil.

## B.VTI REGULASI/STANDAR PROFESIONAL:

Dalam konteks regulasi atau standar profesional, tindakan yang diambil dalam situasi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dalam profesi pendidikan. Standar profesional pendidikan biasanya menekankan pada penilaian yang objektif dan adil terhadap prestasi siswa. Dalam hal ini, merubah jumlah kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi standar penilaian dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip ini. Namun, tekanan dari kepala sekolah dan pemerintah yang menegur terhadap sekolah yang memiliki siswa putus sekolah juga menjadi pertimbangan yang membingungkan bagi dewan guru.

## C. UJI INTUISI:

Dalam konteks uji intuisi, kita dapat melihat bahwa tindakan yang diambil oleh dewan guru dalam memanipulasi kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi standar penilaian namun tetap dinaikkan kelas merupakan tindakan yang kurang tepat. Intuisi kita mungkin memberi sinyal bahwa tindakan ini tidak adil terhadap siswa yang rajin dan telah bekerja keras serta memenuhi kriteria kenaikan kelas. Namun, situasi ini juga kompleks karena adanya tekanan dari kepala sekolah dan pemerintah yang akan menegur terhadap sekolah yang memiliki siswa putus sekolah. Oleh karena itu, meskipun intuisi kita mungkin mengarah ke penolakan terhadap tindakan ini, kita juga harus mempertimbangkan konsekuensi dan tekanan yang ada dalam situasi tersebut.

## D. UJI PUBLIKASI:

Dalam konteks uji publikasi, jika keputusan dewan guru untuk tetap menaikkan kelas dengan merubah jumlah kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi standar penilaian namun tetap dinaikkan kelas dipublikasikan di media atau menjadi viral di media sosial, mungkin akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Orang-orang mungkin akan berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak adil terhadap siswa yang rajin dan telah bekerja keras serta memenuhi kriteria kenaikan kelas. Selain itu, pihak sekolah dan dewan guru juga dapat mendapat sorotan negatif dari publik. Oleh karena itu, dari segi publikasi, keputusan ini mungkin akan dianggap kontroversial dan kontekstual tergantung pada bagaimana publik meresponsnya.

## **E.VJI PANUTAN/IDOLA:**

**Keputusan yang akan diambil, yaitu dengan menabahkan jumlah kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa agar mereka bisa naik kelas, didasarkan pada pertimbangan untuk mementingkan nilai kemanusiaan siswa agar tidak putus sekolah. Dalam konteks ini, keputusan ini mencerminkan prinsip peduli terhadap nasib siswa-siswa tersebut, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya tanpa harus menghadapi risiko putus sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah dan dewan guru bisa menjadi panutan dengan mengambil langkah ini untuk menjaga kesejahteraan siswa dan mengikuti aturan pemerintah yang melarang siswa putus sekolah.**

## 5. PENGUJIAN PARADIGMA BENAR LAWAN BENAR

Paradigma yang sesuai dengan pengujian benar lawan benar dalam situasi tersebut adalah rasa keadilan (justice) lawan rasa kasihan (mercy). Di satu sisi, ada keadilan dalam menambah kehadiran dan memberikan penilaian sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Di sisi lain, terdapat rasa kasihan terhadap siswa yang mungkin akan merasa malu atau bahkan berhenti sekolah jika tidak naik kelas.



## 5. PENGUJIAN JANGKA PENDEK VS JANGKA PANJANG

Paradigma yang juga diperlukan adalah jangka pendek dan jangka panjang. Untuk langkah pencegahan yaitu sekolah memberikan dua pilihan kepada siswa, setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus disadari untuk dilaksanakan. Pilihan tersebut dapat didiskusikan oleh semua pihak yang berkepentingan.

## **6. MELAKUKAN PRINSIP RESOLUSI**

Dalam situasi tersebut prinsip yang digunakan adalah "berpikir berbasis rasa peduli" atau care-based thinking. Keputusan untuk menambah jumlah kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas namun tetap dinaikkan kelas diambil dengan pertimbangan rasa peduli terhadap nasib siswa-siswa tersebut, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga mencapai wajib belajar 12 tahun dengan maksimal.

# 7. INVESTIGASI OPSI TRILEMA

Investigasi Opsi Trilema menghadirkan tantangan etika yang rumit dalam konteks kenaikan kelas di sekolah. Para pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, dan guru menghadapi tiga opsi yang sulit. Pertama, mereka dapat menambah kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi kriteria kenaikan, yang dapat merugikan marwah guru dan prinsip penilaian yang adil. Kedua, mereka bisa memutuskan untuk tidak menambah kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa-siswa tersebut, yang mungkin membuat siswa merasa malu dan berpotensi putus sekolah. Ketiga, mereka dapat mengikuti perintah dari kepala sekolah untuk menambah kehadiran dan memberikan nilai kepada semua siswa tanpa kecuali, meskipun merasa bahwa tindakan ini tidak adil terhadap prinsip penilaian yang benar. Dalam menghadapi opsi-opsi yang sulit ini, mereka harus melakukan investigasi mendalam untuk mencari solusi yang terbaik dalam situasi yang sangat kompleks ini, yang menuntut kebijaksanaan dan pertimbangan etis yang cermat.

# 8. BUAT KEPUTUSAN

Dalam situasi ini, saya akan memilih untuk mengikuti prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwa anak-anak tidak boleh putus sekolah, dan sekolah yang memiliki siswa putus sekolah akan mendapatkan teguran keras. Meskipun ini merupakan dilema etika yang sulit, saya akan menambah kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa-siswa yang tidak memenuhi kriteria kenaikan dengan syarat minimal mereka naik kelas. Namun, saya juga akan menjadwalkan pertemuan orang tua/wali murid dengan dewan guru untuk mendiskusikan cara meningkatkan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan persentase kehadiran siswa di masa depan. Dengan demikian, saya berharap dapat menjaga keseimbangan antara memenuhi aturan pemerintah dan menjaga prinsip penilaian yang adil bagi semua siswa.

## 9. LIHAT LAGI KEPUTUSAN DAN REFLEKSIKAN

Setelah merenungkan kembali keputusan yang telah saya buat, saya menyadari bahwa keputusan tersebut memang tidak mudah. Meskipun telah menambahkan kehadiran dan memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi standar penilaian mungkin kriteria kenaikan kelas tidak sepenuhnya adil, mematuhi aturan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun juga memiliki dampak positif dalam jangka panjang. Namun, saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tetap berusaha untuk dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah sehingga persentase kehadiran siswa dapat ditingkatkan di masa depan. Selain itu, saya akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak menjadi preseden untuk memberikan nilai tanpa mempertimbangkan standar penilaian di masa mendatang. Dalam situasi seperti ini, memang tidak ada solusi yang sempurna, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara aturan pemerintah, kepentingan siswa, dan prinsip penilaian yang adil, saya berharap dapat mengambil langkah terbaik untuk kebaikan semua pihak.

# HAL MENARIK DAN TAK TERDUGA

## HAL MENARIK

Hal yang menarik dari kasus ini adalah bagaimana keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai faktor yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada tekanan untuk mematuhi aturan pemerintah yang mewajibkan wajib belajar 9 tahun tanpa siswa yang putus sekolah. Di sisi lain, prinsip penilaian yang adil dan kualitas pendidikan juga harus dijaga. Konflik antara kewajiban moral terhadap standar penilaian dan tanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah menciptakan dilema etika yang kompleks. Ini menggambarkan betapa sulitnya mengambil keputusan dalam situasi di mana nilai-nilai saling bertentangan.

## HAL TAK TERDUGA

Hal yang tidak terduga dalam kasus ini adalah bagaimana tekanan dari pemerintah untuk mencegah siswa putus sekolah dapat bertentangan dengan prinsip penilaian yang adil dan kualitas pendidikan. Sebelumnya, mungkin tidak diantisipasi bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan yang dapat memaksa sekolah untuk menikan siswa yang sebenarnya tidak memenuhi standar penilaian. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan, terkadang kebijakan luar biasa dapat memunculkan dilema etika yang kompleks bagi para pemangku kepentingan.

TAHAPAN PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN TERHADAP STUDI KASUS PILIHAN, APAKAH TELAH TEPAT, ATAU BELUM? MENGAPA? MASIHKAH ADA PERTANYAAN-PERTANYAAN LANJUTAN DALAM BENAK, APAKAH PILIHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN INI TELAH TEPAT?

TAHAPAN PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN TERHADAP STUDI KASUS INI TELAH BERTJALAN DENGAN BAIK. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCIKENTIFIKASI PARADIGMA DILEMA ETIKA, MENGENALI NILAI-NILAI YANG SALING BERTENTANGAN, SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN BENAR/SALAH DENGAN UJI LEGAL, UJI REGULASI, UJI INTUISI, UJI PUBLIKASI, DAN UJI PANUTAN/IDOLA TELAH DILAKUKAN. SELAIN ITU, PILIHAN KEPUTUSAN TELAH DIANALISIS MENGGUNAKAN TIGA PRINSIP PENYELESAIAN DILEMA, YAITU BERPIKIR BERBASIS RASA PEDULI, INVESTIGASI OPSI TRILEMA, DAN UJI PUBLIKASI.

NAMUN, ADA BEBERAPA PERTANYAAN LANJUTAN YANG DAPAT MUNCUL.

MISALNYA, BAGAIMANA DAMPAK JANGKA PANJANG DARI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM KASUS INI TERHADAP SEKOLAH DAN MURID-MURIDNYA? APAKAH

ADA SOLUSI ALTERNATIF LAIN YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENGATASI DILEMA ETIKA YANG DIHADAPI? BAGAIMANA PIHAK-PIHAK TERKAIT, SEPERTI GURU-GURU DAN ORANG TUA MURID, MERESPON KEPUTUSAN TERSEBUT?

SEMUA PERTANYAAN INI PERLU DIPERTIMBANGKAN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA KEPUTUSAN YANG DIAMBIL ADALAH YANG TERBAIK DALAM SITUASI INI.



## TANGGAPAN DAN PERTANYAAN DARI KELOMPOK LAIN:

### TANGGAPAN PAK IMAM:

DILEMA PENDIDIK MENGIKUTI PEMERINTAH TETAPI HARUS JUJUR DAN OBJEKTIF. BAGAIMANA KELOMPOK 1 HANYA MENYOROTI KEADILAN DAN RASA KASIHAN, DARI KELAKUAN SISWA YANG BELUM DIBERIKAN RASA JERA. BUKANKAH KITA HARUS MENYOROTI JUGA JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG, MENAIKAN SESUAI PEMERINTAH MENJADI KEWAJARAN BAGI SISWA.

JAWABAN DARI BU NURHAMDIYAH

DARI SISI TEORI, SAAT PELAKSANAAN TETAP MENAIKAN NAMUN DALAM KONTEKS  
NAIK BERSYARAT, BEBERAPA TERJADI KAMI BERDISKUSI DENGAN ORANG TUA,  
CURHAT DAN MEMBUAT PILIHAN KEPADA MEREKA, ADA DUA OPSI MENAIKAN  
BERSYARAT TANDA TANGAN SEMUA PIHAK TENTANG PERJANTIAN. ISINYA  
KESEPAKATAN ANTARA LAIN, MENGUBAH TK KEHADIRAN DAN TK AKADEMIK  
DENGAN PANTAVAN. MENYESUAIKAN DENGAN KONDISI NYATA REALISASI. KEDUA  
MEMBERIKAN TAWARAN KEPADA ORANGTUA DAN SISWA, PILIHAN MAU NAIK ATAU  
TIDAK NAIK ATAU MENGULANG

## JAWABAN DARI PAK ADE

PERTAMA, DISINI BAPAK IBU GURU MEMBERIKAN NILAI ADA PRINSIP KEADILAN DALAM MENILAI. KRITERIANYA SUDAH ADA, DIHARAPKAN GURU DAPAT MENGGAMBARKAN SESUATU SENYATANYA. ADA KASIHAN JUGA KARENA ADA KEPUTUS ASAAN KHAWATIR TIDAK NAIK KELAS. MENJADWALKAN PERTEMUAN DENGAN ORA TUA DAN DEWAN GURU, KONSEKVENSI SAAT MEMILIH. BANTUAN DARI WALI SISWA UNTUK KERJA SAMA DENGAN SEKOLAH. DI SEKOLAH ADA CATATAN KESEPAKATAN UNTUK BERUBAH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA. SEKOLAH TIDAK MENGINGINKAN ADANYA KASUS SEPERTI ITU. DARI KAMI MENGGARIWBAWAHI, ORIENTASI TETAP KEPENTINGAN TERHADAP MURID YANG UTAMA

# TERIMA KASIH

kami siap mendengarkan tanggapan,  
saran, dan masukan dari Anda

